

ABSTRAK

Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama. Demikian juga dengan perceraian, perceraian yang hanya dilakukan secara hukum negara saja tetapi apabila hukum agama melarang, tidak dapat memberikan legalitas perceraian tersebut. Apabila hukum agama kedua belah pihak melarang perceraian, maka perceraian tersebut tidak dapat dilaksanakan, meskipun Undang-Undang atau pun hukum negara memungkinkannya. Hukum adat Batak apabila akan terjadi perceraian, maka akan diselesaikan terlebih dahulu secara adat, yaitu terlebih dahulu dikumpulkan penatua-penatua adat dan juga kerabat kekerabatan dari *dalihan na tolu* untuk membicarakan hal-hal yang terjadi diantara kedua belah pihak, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan dalam Pasal 38 “Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan” dan dalam Pasal 39 menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian masyarakat Batak Toba Kristen di Samosir berdasarkan hukum adat dan ajaran agama Kristen dan untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara perceraian Batak Toba Kristen, sejalan atau tidak dengan hukum adat Batak Toba dan ajaran agama Kristen. penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu yaitu penggunaan jenis penelitian ini dilakukan dengan hukum yang menjadi variabel akibat/merupakan studi hukum kepada masyarakat. Penelitian ini ialah dengan melakukan wawancara.

Hasil penelitian ialah pelaksanaan perceraian pada masyarakat Batak Toba Kristen di Samosir berdasarkan hukum adat dan ajaran agama Kristen tidak pernah terjadi karena hal ini tidak bisa diterima masyarakat, selain memisahkan suami isteri tetapi juga akan memisahkan dua keluarga besar. Para penatua adat dan pemimpin gereja tidak akan mengabdikan keinginan mereka yang ingin bercerai/ berpisah tetapi akan berusaha mendamaikan dengan berbagai cara. Pihak yang ingin bercerai memilih menjauhi/ menghindari penatua adat dan pemimpin gereja dan lebih memilih mengasingkan diri (pindah ranjang dengan pasangannya). Kewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara perceraian tidak sejalan dengan hukum adat Batak Toba dan ajaran agama Kristen, karena nilai-nilai dalam hukum adat dan ajaran agama Kristen menentang adanya perceraian. Adat Batak Toba dan ajaran agama Kristen tidak mengkehendaki adanya perceraian

Kata kunci: Adat Batak Toba, Agama Kristen, Hukum Negara, dan Perceraian

ABSTRACT

A marriage is legitimate if its done based on the law of each religion. Likewise with a divorce, the divorce is only done for the law of the state, but if religion law forbid can not give the legality of its divorce. If religion law of each sides banned divorce then divorce is can not be done despite the law or law of state are alllows it. In Bataknese customary law, if going to be a divorce, then it will be settled first by custom that is by make a meeting with indigineous people and also family from *dalihan na tolu* to discuss all things that happened between both sides. Whereas in law no.1 year 1974 about marriage, stated in paragraph 38 “Marriage can break up because of death, divorce, and the decision of the court” and in paragraph 39 states that “Divorce only can be done in front of the trial court after the ourt try to solve the problem and not successful conciliate boh sides.”

The problem that studied in this research and also become the objectives of the research to know how the implementation of a divorce on christian tobanesse societies in Samosir based on customary law ,christian teaching and to know how the authority of the court in adjudicating cases of divorce christian tobanese society, in line or not with customary law and christian teaching. This research is using empirical research that is the use of this research is done by law which become the cause variable which constitutes law study to society. This research is using interview method.

The result of this research is implementation of divorce on Christian tobanese people in samosir based on customary law and christian teaching never occured due to this thing can not be accepted by society, it is not only separate between husband and wife but also break up two big families. The indigineous people and church leader will not agreeing their urge who going to divorce butt it will try to conciliate with many kind of ways. The parties who wants to divorce choose to avoid indigineous people and church leader and more choosing alienate themselves (saperate bed with their couple). The authority of court in handlling the cases of divorce is not in line with tobanese custom law and christian teaching, because values in custtom law and christian law oppose the existence of divorce. Tobanese custom and christian teaching did not require the existence of divorce.

Keyword: The indigenous Batak Toba, Christian religion, the law of state and divorce